



TRIWULAN<sup>1</sup>

2023

*LAPORAN KINERJA*



## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Banten ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran pencapaian kinerja kegiatan atas dokumen rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Akhir kata, semoga penyajian laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten dapat menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) pada akhir tahun 2023.

Serang,       Maret 2023

**Plt. INSPEKTUR DAERAH**

**PROVINSI BANTEN**



**USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si.**  
**NIP. 19700320 200112 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I .....1

PENDAHULUAN .....1

BAB II .....7

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN I .....7

    I.    Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten .....7

    II.   Program Penyelenggaraan Pengawasan.....8

    III.  Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi..... 11

BAB III..... 12

PENUTUP ..... 12

**BAB I****PENDAHULUAN**

Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Data hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi pelaksanaan evaluasi, baik evaluasi tahap pelaksanaan (*ongoing*), evaluasi hasil, maupun evaluasi pra-rencana (*ex ante*).

Kebutuhan akan data secara sistematis sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.

Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program), selain itu kegiatan monitoring juga dapat memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan untuk melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indikator penting untuk

mengetahui kinerja APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:

1. Memberikan informasi yg valid ttg kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai ;
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik thd nilai2 yg mendasari pemilihan tujuan & target ;
3. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien;
4. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
5. Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
6. Membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek ;
7. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
8. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan Pimpinan organisasi melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan dilakukan untuk memenuhi/menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Banten. Pada Tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Banten terdiri dari 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas).

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung berdasarkan target dokumen Perjanjian kinerja yang ditetapkan di awal tahun anggaran dibandingkan dengan realisasi capaian pada akhir periode anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan dari penetapan kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Monitong dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja dan pengelolaan data Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Alur kerja yang dilakukan adalah Unit Kerja melakukan pengukuran kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. Hasil pengukuran kinerja merupakan sumber data kinerja yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja.

Penetapan kinerja tahun 2023 merupakan tahun ke-1 Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026, dengan penetapan kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Target Indikator Kinerja Program Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70-80
		Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal	Nilai	14
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.1375
3	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1 Unit Kerja



Tabel 1.2  
Target Indikator Kinerja Program Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100%
a	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100%
b	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100%
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	100%
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	100%
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100%
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100%
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunnya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah	Persen	100%
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Persen	100%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pesentase jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti	Persen	80%
		Persentase ketercapaian penyelenggaraan pengawasan	Persen	100%
a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persen	100%
b	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persen	100%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase ketercapaian perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi		
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terciptanya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persen	100%
b	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Persen	100%

## BAB II

### HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN I

#### I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten

Realisasi program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp.9.877.757.398, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi Rp. 9.370.888.674 (16.91%)
  - a. Telah terealisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yaitu pembayaran gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Provinsi Banten selama 3 bulan;
  - b. Telah terealisasi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN selama 3 bulan;
  - c. Telah terealisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan pada triwulan 1.
2. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 12.370.000 (4.03%)
  - a. Telah tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 11.170.000;
  - b. Telah tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu penyusunan LKIP tahun 2022 sebesar Rp.1.200.000.
3. Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah telah terlaksana sebesar Rp.61.950.000 dengan jumlah ASN yang mengikuti diklat substantif sebanyak 19 orang.
4. Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah baru terlaksana Rp.8.652.500 yaitu perjalanan dinas dalam daerah.
5. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat belanja penyediaan rutin kantor yang telah terlaksana sebesar Rp.403.231.385
  - a. Tersedianya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 3 bulan;
  - b. Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 3 bulan.
6. Pada kegiatan Pengadaan Barang Daerah Milik Daerah belum ada penyerapan baik dari keuangan maupun kinerja, karena pelaksanaannya masih menunggu e-catalog dari Biro Barjas.

## II. **Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Realisasi kegiatan **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** sebesar Rp. 501,331,000.00 (8,22%) sedangkan realisasi kegiatan **Audit Dengan Tujuan Tertentu** sebesar Rp. 105,683,950.00 (6,26%).

Dengan rincian pengawasan sebagai berikut :

- a. Pada Inspektur Pembantu I, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

### **Triwulan I :**

- Monitoring Kas Opname, Stock Opname, dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 20 LHP;
- Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, sebanyak 20 LHP;
- Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
- Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, sebanyak 1 LHP;
- Pengawasan Stock Opname Vaksin Covid-19 Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 3 LHP;
- Reviu Belanja Sewa Gedung UPTD PPD Kelapa Dua dan UPTD PPD Serpong Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
- Reviu Dokumen Perencanaan Hibah/Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
- Reviu Dokumen Perencanaan Hibah Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 5 LHP;
- Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Triwulan I Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Probit Audit Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Probit Audit Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;

- Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, sebanyak 2 LHP.
- b. Pada Inspektur Pembantu II, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

**Triwulan I :**

- Monitoring Kas Opname, Stock Opname, dan Rekon Aset Tahap II Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 19 LHP;
- Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Rencana Pembangunan Gedung Kantor UPTD BPMHP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Probit Audit atas Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor UPTD PPMHP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bante, sebanyak 1 LHP;
- Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, sebanyak 19 LHP;
- Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
- Audit Kinerja Program Prioritas pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, sebanyak 4 LHP;
- Reviu Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 5 LHP;
- Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, sebanyak 4 LHP;
- Probit Audit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, sebanyak 1 LHP;
- Probit Audit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, sebanyak 1 LHP;

- Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, sebanyak 1 LHP.
- c. Pada Inspektur Pembantu III, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :
- Triwulan I :**
- Verifikasi dan Validasi data pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 24 LHP;
  - Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 1 LHP;
  - Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 33 LHP;
  - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 33 LHP.
- d. Pada Inspektur Pembantu IV, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

**Triwulan I :**

- Audit Tujuan Tertentu atas Pekerjaan Struktur Beton Plat Lantai Beton K.300 Ready Mixed Kegiatan Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai (Pekerjaan Breakwater Pelabuhan Perikanan Binuangeun) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas dugaan masalah Proyek Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Jalan Lingkungan) Perum Pondok Sukatani Permai RT 01 RW 02 Kelurahan Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Investasi pada PT. Agrobisnis Banten Mandiri (PT. ABM) Tahun Anggaran 2020 - 2022, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Pemanfaatan dan atau Penggunaan Lahan oleh pihak RSUD Banten, sebanyak 1 LHP.

**III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

1. Pada kegiatan **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** yang didalamnya bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan-kebijakan teknis pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengawasan di Provinsi Banten. Sampai dengan triwulan 1 belum melaksanakan kegiatan, karena kegiatan akan dimulai pada triwulan III sesuai dengan matriks rencana aksi.
2. Pada kegiatan **Pendampingan dan Asistensi** pada Inspektur Pembantu IV, telah terlaksana kegiatan sebagai berikut :

**Triwulan I :**

- Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 41 LHP;
- Monitoring dan Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), yaitu LHKPN dan SPT Tahunan pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022;
- Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 41 LHP.

**BAB III****PENUTUP**

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Inspektorat Provinsi Banten pada Triwulan I tahun 2023, baik capaian kinerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Dengan adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas rencana aksi yang telah disusun ditahun ini dan sebagai bahan untuk pembuatan rencana aksi ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.

Serang,       Maret 2023

**Plt. INSPEKTUR DAERAH**



**USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si.**  
**NIP. 19700320 200112 1 001**

# LAMPIRAN



**TARGET KINERJA PENGAWASAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2023**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**TARGET KINERJA PENGAWASAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2023**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

**TARGET DAN REALISASI KINERJA PENGAWASAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2023**

No	Area Pengawasan	Ruang Lingkup	RPL	Jumlah Laporan	Target			Realisasi		
					Jan	Feb	Mrt	Jan	Feb	Mrt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>INSPEKTUR PEMBANTU I</b>										
1	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 Tahap 1,2 dan 3	2 OPD	Maret Juli Oktober Desember	Belum dilaksanakan						
2	Probity Audit Tahap I dan II	2 OPD	Maret September	3 Laporan						
3	Monitoring dan Evaluasi LK-OPD TA. 2022	20 OPD	Februari	20 Laporan						
4	Monitoring dan Evaluasi Kas Opname, Stok Opname dan Rekon Aset di lingkungan OPD/ UPT/Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahap 1	20 OPD	Januari	20 Laporan						
5	Monitoring Kas dan Stok Opname di lingkungan OPD/UPT/Sekolah Pemerintah Provinsi Banten Tahap 2	20 OPD	Januari 2024	Belum dilaksanakan						
6	Reviu LKPD TA. 2022	Pemprov Banten	Februari	1 Laporan						
7	Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	2 OPD	Januari (diluar PKPT)	2 OPD						
8	Pengawasan Stock Opname Vaksin Covid-19 Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten	1 OPD	Januari (diluar PKPT)	1 OPD						
9	Reviu Belanja Sewa Gedung UPTD PPD Kelapa Dua dan UPTD PPD Serpong Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten	2 UPTD	Februari (diluar PKPT)	2 UPTD						
10	Reviu Dokumen Perencanaan Hibah/Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	2 OPD	Maret (diluar PKPT)	2 OPD						

No	Area Pengawasan	Ruang Lingkup	RPL	Jumlah Laporan	Target			Realisasi		
					Jan	Feb	Mrt	Jan	Feb	Mrt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Reviu Dokumen Perencanaan Hibah Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	5 OPD	Maret (diluar PKPT)	5 OPD						
12	Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Triwulan I Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten	1 OPD	Maret (diluar PKPT)	1 OPD						
13	Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022	2 Kab/Kota	Diluar PKPT	Batas waktu LHP Mei 2023						
<b>Jumlah LHP yang ditargetkan</b>				<b>74 LHP</b>						
<b>Jumlah LHP di luar PKPT</b>				<b>13 LHP atau 17.57 % dari target LHP</b>						
<b>Jumlah LHP yang direalisasikan</b>				<b>57 LHP atau 77.03% dari target LHP</b>						
<b>INSPEKTUR PEMBANTU II</b>										
1	Audit Ketaatan Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kab/Kota	Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kab. Pandeglang	Maret	Belum dilaksanakan						
2	Lanjutan Monitoring dan Evaluasi Kas Opname, Stock Opname dan rekon aset TA. 2022 pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	OPD Provinsi Banten	Januari	19 Laporan						
3	Monitoring dan Evaluasi LK-OPD TA 2022	OPD Provinsi Banten	Januari	19 Laporan						
4	Monitoring Proses Pengadaan Barang Jasa dan Modal TA 2023	OPD Provinsi Banten	Maret Mei	Belum dilaksanakan						
5	Audit kinerja program prioritas dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten ( Audit kinerja program prioritas dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2022)	OPD Provinsi Banten	Februari	Belum dilaksanakan						
6	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Rencana Pembangunan Gedung Kantor UPTD BPMHP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	1 OPD	Januari (diluar PKPT)	1 Laporan						
7	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022	19 OPD	Januari (diluar PKPT)	19 Laporan						

No	Area Pengawasan	Ruang Lingkup	RPL	Jumlah Laporan	Target			Realisasi		
					Jan	Feb	Mrt	Jan	Feb	Mrt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	2 OPD	Januari (diluar PKPT)	2 Laporan						
9	Audit Kinerja Program Prioritas pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022	4 OPD	Maret (diluar PKPT)	4 Laporan						
10	Reviu Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	5 OPD	Februari (diluar PKPT)	5 Laporan						
11	Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022	4 kab/kota		Laporan belum di terima						
Jumlah LHP yang ditargetkan				50 LHP						
Jumlah LHP di luar PKPT				31 LHP atau 62 % dari target LHP						
Jumlah LHP yang direalisasikan				69 LHP atau 138 % dari target LHP						
INSPEKTUR PEMBANTU III										
1	Reviu LPPD Provinsi Banten Tahun 2022	1 LPPD Provinsi Banten	Maret	1 LHR						
2	Evaluasi AKIP OPD Provinsi Banten Tahun 2022	33 OPD di Provinsi Banten	Maret	33 LHE						
3	Pendampingan / Reviu atas dokumen LKIP OPD Provinsi Banten Tahun 2022	33 OPD di Provinsi Banten	Februari	33 LHE						
4	Verifikasi dan Validasi data pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022	24 OPD	Januari (di luar PKPT)	24 LHP						
Jumlah LHP yang ditargetkan				67 LHP						
Jumlah LHP di luar PKPT				24 LHP atau 35.82 % dari target LHP						
Jumlah LHP yang direalisasikan				91 LHP atau 135.82 % dari target LHP						
INSPEKTUR PEMBANTU IV										
1	Evaluasi Manajemen ASN (Pengawasan Pengendalian Kepegawaian Daerah)	39 OPD	Maret	Laporan belum di terima						
2	MONEV IEPK- Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	39 OPD	Maret	Belum dilaksanakan						

No	Area Pengawasan	Ruang Lingkup	RPL	Jumlah Laporan	Target			Realisasi		
					Jan	Feb	Mrt	Jan	Feb	Mrt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pendampingan Penilaian Resiko Kecurangan (FCP)	39 OPD	Maret	Belum dilaksanakan						
4	Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022	41 OPD	Maret (diluar PKPT)	41 LHP						
5	Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022	41 OPD	Februari (diluar PKPT)	41 LHP						
6	Audit Tujuan Tertentu atas Pekerjaan Struktur Beton Plat Lantai Beton K.300 Ready Mixed Kegiatan Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai (Pekerjaan Breakwater Pelabuhan Perikanan Binuangeun) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021	1 OPD	Januari (diluar PKPT)	1 OPD						
7	Audit Tujuan Tertentu atas dugaan masalah Proyek Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Jalan Lingkungan) Perum Pondok Sukatani Permai RT 01 RW 02 Kelurahan Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang	1 OPD	Maret (diluar PKPT)	1 OPD						
8	Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Investasi pada PT. Agrobisnis Banten Mandiri (PT. ABM) Tahun Anggaran 2020 - 2022	1 OPD		Laporan belum di terima						
9	Audit Tujuan Tertentu atas Pemanfaatan dan atau Penggunaan Lahan oleh pihak RSUD Banten	1 OPD		Laporan belum di terima						
<b>Jumlah LHP yang ditargetkan</b>				<b>117 LHP</b>						
<b>Jumlah LHP di luar PKPT</b>				<b>84 LHP atau 71.79 % dari target LHP</b>						
<b>Jumlah LHP yang direalisasikan</b>				<b>84 LHP atau 71.79 % dari target LHP</b>						